

Kerajaan Mughal: Puncak Peradaban Islam di Tengah Dominasi Agama Hindu di India

Siti Maulidiya Agustin¹, Arbi²

^{1,2} Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
e-mail: sitimaulidiya2808@gmail.com¹, arbiyasin@uin-suska.ac.id²

Abstrak

Kerajaan Mughal di India merupakan salah satu peradaban Islam terbesar yang berhasil mencapai puncak kejayaannya di tengah dominasi mayoritas agama Hindu. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan dan strategi pluralisme agama yang diterapkan oleh para pemimpin Mughal, terutama Akbar, mampu menciptakan harmoni antara komunitas Muslim dan Hindu, serta menjaga stabilitas politik dalam masyarakat yang beragam. Kebijakan seperti "Sulh-i Kull" (perdamaian universal), penghapusan pajak jizyah, pernikahan politik dengan bangsawan Hindu, dan pengangkatan pejabat Hindu ke dalam pemerintahan memainkan peran penting dalam membangun koeksistensi yang damai. Pengaruh kebijakan ini tidak hanya terlihat dalam struktur pemerintahan yang inklusif dan stabil, tetapi juga dalam perkembangan seni, budaya, dan arsitektur Mughal, yang memperlihatkan perpaduan elemen-elemen Islam dan Hindu. Artikel ini juga menyoroti pelajaran penting yang dapat diambil dari keberhasilan dinasti Mughal dalam mengelola keberagaman agama untuk diaplikasikan pada konteks kontemporer, khususnya di negara-negara dengan latar belakang pluralistik. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa toleransi, inklusivitas, dan dialog antaragama adalah kunci untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial, serta merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan dalam membangun peradaban yang maju.

Kata kunci: *Kerajaan Mughal, Pluralisme Agama, Toleransi, Islam-Hindu, Stabilitas Politik, Seni dan Budaya.*

Abstract

The Mughal Empire in India was one of the greatest Islamic civilizations that managed to reach the peak of its glory amidst the dominance of the Hindu majority. This article discusses how the policies and strategies of religious pluralism implemented by Mughal leaders, especially Akbar, were able to create harmony between Muslim and Hindu communities, as well as maintain political stability in a diverse society. Policies such as "Sulh-i Kull" (universal peace), abolition of the jizya tax, political marriages with Hindu nobles, and appointment of Hindu officials into the government played an important role in establishing peaceful coexistence. The influence of these policies is visible not only in an inclusive and stable government structure, but also in the development of Mughal art, culture, and architecture, which displays a fusion of Islamic and Hindu elements. This article also highlights important lessons that can be drawn from the success of the Mughal dynasty in managing religious diversity to be applied in contemporary contexts, especially in countries with pluralistic backgrounds. The conclusion of this research shows that tolerance, inclusiveness and interfaith dialogue are the keys to creating political and social stability, as well as embracing diversity as a source of strength in building an advanced civilization.

Keywords: *Mughal Empire, Religious Pluralism, Tolerance, Islam-Hinduism, Political Stability, Arts and Culture.*

PENDAHULUAN

Kerajaan Mughal merupakan salah satu dinasti Islam terbesar dan paling berpengaruh yang pernah ada di wilayah Asia Selatan, terutama di India. Didirikan oleh Babur pada awal abad ke-16, dinasti ini memerintah selama lebih dari tiga abad dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan kaisar-kaisar seperti Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangze. Di bawah

kepemimpinan mereka, India mengalami kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk arsitektur, seni, sastra, dan administrasi pemerintahan. Meskipun berada di tengah mayoritas penduduk Hindu, dinasti Mughal mampu menjalin harmoni agama yang unik melalui kebijakan toleransi dan inklusi, khususnya di masa pemerintahan Akbar yang mempromosikan "Din-i Ilahi", sebuah konsep sinkretisme agama. Pengaruh peradaban Mughal tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga mencakup transformasi sosial dan budaya yang mendalam, yang masih terasa hingga hari ini.

Dinasti Mughal memiliki sebuah keunikan mulai dari seni, bangunan yang megah, bangunan masjid, dan masih ada beberapa bangunan lagi. Yang paling menarik dalam dinasti Mughal ini mempunyai agama yang dianut yakni Hindu dan Islam. Meskipun kadang terjadi perbedaan pendapat antar kepercayaan, pada akhirnya dinasti Mughal ini mengalami kemunduran karena beberapa faktor, dari segi ekonomi, militer, pemerintahan yang lemah setelah Aurangzeb, dan pemborosan keuangan oleh kalangan istana yang mengakibatkan kemunduran dinasti Mughal di India dan digantikan oleh Inggris.

Meneliti puncak peradaban Islam di tengah dominasi agama Hindu di India menjadi semakin relevan mengingat dinamika politik dan sosial yang berkembang saat ini, di mana ketegangan agama sering kali menjadi isu yang mempengaruhi stabilitas sosial di berbagai belahan dunia. Dengan memahami bagaimana dinasti Mughal mampu menciptakan model pemerintahan yang inklusif dan pluralis di tengah dominasi Hindu, kita dapat menggali pelajaran penting dalam membangun toleransi antaragama dan menyelesaikan konflik identitas di masyarakat modern. Selain itu, periode kejayaan Mughal menawarkan contoh bagaimana kebijakan yang didasari oleh dialog antaragama dan pemahaman budaya mampu membawa kemajuan dan stabilitas politik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi kajian sejarah Islam di Asia Selatan, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi upaya membangun kohesi sosial dalam konteks pluralitas agama saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah utama yang akan dijawab melalui penelitian ini. Pertama, bagaimana Kerajaan Mughal mampu membangun puncak peradaban Islam di India di tengah dominasi mayoritas agama Hindu. Kedua, apa saja kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh para pemimpin Mughal untuk menjalin hubungan harmonis antara Islam dan Hindu, serta menjaga stabilitas politik di tengah perbedaan agama. Ketiga, bagaimana pengaruh kebijakan pluralisme agama tersebut terhadap perkembangan peradaban Mughal, khususnya dalam bidang seni, budaya, dan administrasi pemerintahan. Keempat, pelajaran apa yang dapat diambil dari keberhasilan dinasti Mughal dalam mengelola keberagaman agama untuk diaplikasikan pada konteks kontemporer, terutama di negara-negara yang memiliki latar belakang pluralistik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna, pengalaman, serta fenomena sejarah terkait Kerajaan Mughal dari perspektif yang mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi aspek-aspek kompleks peradaban Mughal, termasuk dinamika sosial, politik, dan budaya yang terbentuk dalam interaksi antara Islam dan Hindu di India. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai narasi sejarah, kebijakan agama, serta pengaruh peradaban Mughal terhadap masyarakat India. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif akan lebih efektif karena mengutamakan interpretasi mendalam terhadap data, sehingga dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan pluralisme agama diterapkan oleh para penguasa Mughal dan dampaknya terhadap peradaban.

Penelitian ini mengandalkan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, yang melibatkan kajian terhadap berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Sumber-sumber primer yang digunakan meliputi catatan sejarah, dokumen-dokumen administratif, serta manuskrip kuno yang mencatat kebijakan dan pemerintahan Mughal. Sementara itu, sumber-sumber sekunder berupa buku-buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Penekanan pada literatur sejarah ini bertujuan untuk memahami lebih

dalam tentang proses puncak peradaban Islam di India serta bagaimana dominasi agama Hindu mempengaruhi dinamika pemerintahan dan kebudayaan pada masa itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah Kerajaan Mughal dalam Membangun Puncak Peradaban Islam di India

Kerajaan Mughal berhasil membangun puncak peradaban Islam di India meskipun berada di tengah dominasi mayoritas agama Hindu melalui serangkaian kebijakan inklusif dan pemerintahan yang toleran. Salah satu kunci keberhasilan ini adalah pendekatan akomodasi yang dilakukan oleh para kaisar Mughal, terutama Akbar yang memperkenalkan kebijakan "Sulh-i Kull" atau perdamaian universal, yang memungkinkan berbagai kelompok agama hidup berdampingan secara harmonis. Akbar memahami bahwa untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial, ia perlu merangkul populasi Hindu yang dominan. Oleh karena itu, ia tidak hanya mengizinkan tetapi juga mendorong keterlibatan para elit Hindu dalam pemerintahan dan militer, bahkan menikahi putri-putri bangsawan Hindu untuk mempererat hubungan dengan komunitas tersebut. Selain itu, Akbar menghapus jizyah, pajak yang dikenakan pada non-Muslim, dan mendirikan Din-i Ilahi, sebuah filosofi sinkretis yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai agama dengan tujuan mempromosikan harmoni antaragama.

Penerus Akbar, seperti Jahangir dan Shah Jahan, juga melanjutkan kebijakan toleransi beragama ini meskipun dengan pendekatan yang sedikit berbeda. Di masa Shah Jahan, kita melihat puncak kemegahan seni dan arsitektur Mughal yang menggambarkan sinergi antara tradisi Islam dan Hindu, seperti yang terlihat dalam karya monumental seperti Taj Mahal, yang mencerminkan perpaduan unsur seni Persia, Islam, dan India. Kerajaan Mughal juga mendukung berbagai bentuk seni, budaya, dan sastra yang mencerminkan pluralitas budaya di India.

Keberhasilan ini tidak hanya terletak pada kebijakan politik dan sosial, tetapi juga pada administrasi yang efisien dan sistem hukum yang mampu mengakomodasi keberagaman etnis dan agama di India. Dengan memberikan otonomi lokal kepada para penguasa Hindu di wilayah tertentu, Mughal menciptakan rasa kepemilikan di antara masyarakat lokal, sehingga memperkuat stabilitas kerajaan. Inklusi sosial dan religius ini memungkinkan Kerajaan Mughal menjadi salah satu peradaban Islam terbesar di dunia, dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan pemerintahan yang tetap relevan dalam sejarah peradaban global.

Kebijakan dan Strategi dalam Menjalin Hubungan Harmonis antara Islam dan Hindu di India

Para pemimpin Mughal, terutama Akbar, Jahangir, dan Shah Jahan, menerapkan sejumlah kebijakan dan strategi untuk menjalin hubungan harmonis antara Islam dan Hindu serta menjaga stabilitas politik di tengah perbedaan agama di India. Salah satu kebijakan paling menonjol adalah penerapan "Sulh-i Kull" atau perdamaian universal oleh Akbar. Kebijakan ini mendorong toleransi agama di seluruh wilayah kerajaan, sehingga semua kelompok agama, termasuk Hindu, Jain, Zoroaster, dan Kristen, bisa hidup berdampingan secara damai tanpa mengalami diskriminasi. Akbar juga menghapus pajak jizyah, yang sebelumnya dikenakan pada non-Muslim, sehingga memperkuat dukungan dan loyalitas dari masyarakat Hindu yang mayoritas.

Selain itu, Akbar memperkenalkan strategi politik pernikahan dengan menikahi putri-putri bangsawan Hindu Rajput, yang memperkuat aliansi politik dengan komunitas Hindu. Langkah ini tidak hanya mempererat hubungan antara Mughal dan Rajput, tetapi juga mengurangi potensi pemberontakan dari kelompok Hindu yang memiliki kekuatan militer signifikan. Pengangkatan pejabat Hindu ke posisi tinggi dalam pemerintahan juga menjadi strategi penting. Banyak dari mereka diangkat sebagai mansabdar (penguasa feodal) dan ditempatkan di berbagai wilayah, memberikan mereka tanggung jawab dalam administrasi, sekaligus menciptakan rasa kepemilikan terhadap kerajaan. Kebijakan inklusif ini juga diterapkan dalam budaya dan seni, di mana seni arsitektur Mughal menggabungkan unsur-unsur Hindu dan Islam, menciptakan identitas budaya yang inklusif dan unik. Misalnya, pembangunan Taj Mahal oleh Shah Jahan menggabungkan elemen-elemen arsitektur India dengan gaya Persia dan Islam, mencerminkan persatuan estetika lintas budaya.

Adapun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Mughal di India memang tidak seprestisius dinasti-dinasti Islam sebelumnya, namun tercatat dalam sejarah ilmu

pengetahuan dan teknologi pada masa dinasti Mughlaa cukup berkembang, hal tersebut dapat dilihat dari peninggalan yang ditinggalkan oleh dinasti Mughal ini. Adapun faktor internal seperti tampilnya para penguasa yang lemah, terjadinya perebutan kekuasaan antar keturunan kerajaan, dan lemahnya kontrol kekuasaan. Sedangkan faktor eksternal adalah terjadinya pemberontakan di mana-mana serta ekspansi penjajahan Inggris ke India.

Strategi ini berlanjut di bawah Jahangir dan Shah Jahan, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Jahangir, meski seorang Muslim, tetap melanjutkan tradisi toleransi beragama dan menjaga keterlibatan para bangsawan Hindu di dalam birokrasi. Dengan cara ini, para penguasa Mughal berhasil menciptakan stabilitas politik dan sosial yang relatif kuat, karena mereka mengakui pentingnya merangkul pluralitas agama sebagai bagian dari pemerintahan mereka. Kombinasi kebijakan politik, sosial, dan budaya ini memungkinkan Mughal menjaga keharmonisan di tengah perbedaan agama dan mengokohkan stabilitas yang menopang kejayaan mereka.

Pengaruh Kebijakan Pluralisme Agama terhadap Peradaban Mughal

Kebijakan pluralisme agama yang diterapkan oleh para pemimpin Mughal memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan peradaban Mughal, terutama dalam bidang seni, budaya, dan administrasi pemerintahan. Dalam bidang seni, pengaruh pluralisme agama terlihat jelas melalui seni arsitektur dan seni rupa. Bangunan-bangunan megah seperti Taj Mahal, Benteng Agra, dan Masjid Jama mencerminkan perpaduan gaya arsitektur Islam, Persia, dan elemen-elemen Hindu, yang menciptakan identitas budaya yang unik dan beragam. Dekorasi bangunan, penggunaan motif bunga, kaligrafi, serta elemen geometris khas Islam dipadukan dengan seni ukir batu khas India, melahirkan gaya arsitektur yang indah dan ikonik. Selain itu, seni miniatur Mughal juga menggabungkan tradisi seni Persia dan India, dengan ilustrasi yang menggambarkan kehidupan istana, pertempuran, dan adegan sehari-hari yang sarat dengan nilai-nilai simbolis lintas agama.

Di bidang budaya, kebijakan pluralisme agama Mughal mempengaruhi perkembangan sastra dan musik. Selama pemerintahan Akbar, kesusastraan dalam berbagai bahasa, termasuk Persia, Hindi, dan Urdu, berkembang pesat, menghasilkan karya-karya yang mencerminkan keragaman budaya kerajaan. Akbar juga mensponsori pengembangan musik, di mana bentuk musik klasik India, seperti Dhrupad, disempurnakan dan dikombinasikan dengan pengaruh musik Persia dan Islam. Kesenian ini memperkuat identitas budaya Mughal yang pluralis, menghargai keragaman tradisi seni dan budaya yang ada di wilayah kekuasaan mereka.

Dalam administrasi pemerintahan, pluralisme agama Mughal tercermin dalam struktur birokrasi yang inklusif dan meritokratis. Akbar, misalnya, mengangkat pejabat-pejabat Hindu dalam posisi penting di pemerintahan, termasuk sebagai mansabdar dan gubernur wilayah, yang tidak hanya memberikan kontribusi pada stabilitas politik, tetapi juga meningkatkan efisiensi administrasi. Kebijakan ini memperluas basis dukungan sosial dan politik Mughal, karena berbagai kelompok agama merasa terwakili dan memiliki peran dalam pemerintahan. Di bawah struktur mansabdari, sistem pengelolaan wilayah menjadi lebih stabil dan teratur karena para pemimpin lokal diberikan kewenangan administratif yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, baik dari segi agama maupun budaya. Dengan demikian, kebijakan pluralisme agama tidak hanya memperkuat legitimasi politik Mughal, tetapi juga memungkinkan kemajuan seni, budaya, dan sistem pemerintahan yang efisien, menjadikan Kerajaan Mughal salah satu peradaban paling maju dan pluralis pada masanya.

Hikmah dari Keberhasilan Dinasti Mughal dalam Mengelola Keberagaman Agama

Keberhasilan Dinasti Mughal dalam mengelola keberagaman agama memberikan pelajaran berharga bagi negara-negara kontemporer yang memiliki latar belakang pluralistik. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya toleransi dan inklusivitas sebagai landasan kebijakan pemerintahan. Para pemimpin Mughal, terutama Akbar, berhasil menciptakan stabilitas politik dan sosial dengan mengakui serta menghargai keragaman agama di India, termasuk mayoritas Hindu, dan memberikan ruang bagi semua kelompok agama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Di dunia modern, di mana banyak negara menghadapi tantangan perbedaan etnis, agama, dan budaya, kebijakan ini mengajarkan pentingnya mengadopsi pendekatan inklusif yang menghormati keragaman dan mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Hal ini relevan di negara-

negara dengan komposisi masyarakat yang majemuk, di mana kebijakan pluralistik dapat menjadi kunci untuk mencegah konflik dan menciptakan kohesi sosial.

Pelajaran lain yang dapat diambil adalah pentingnya dialog antaragama dan kolaborasi dalam menciptakan rasa saling menghormati dan kerja sama lintas komunitas. Akbar tidak hanya memperkenalkan kebijakan "Sulh-i Kull" yang mempromosikan perdamaian universal, tetapi juga menciptakan ruang untuk diskusi antaragama melalui "Ibadat Khana," di mana para pemuka agama dari berbagai kepercayaan dapat berdialog. Di dunia kontemporer, dialog semacam ini sangat penting dalam mencegah radikalisme dan ekstremisme, serta membangun fondasi untuk koeksistensi yang damai. Pemerintah modern dapat belajar dari pendekatan ini dengan menciptakan forum dialog antaragama dan memperkuat kerjasama lintas agama dalam mengatasi isu-isu sosial.

Selain itu, pelajaran penting lainnya adalah bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan. Dinasti Mughal menunjukkan bahwa pluralisme dapat mendorong kemajuan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Di era globalisasi saat ini, negara-negara yang berhasil mengelola keberagaman dengan baik dapat memanfaatkan potensi kreatif dan inovatif dari masyarakat multikultural mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan stabilitas politik. Dalam konteks kontemporer, penerapan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif semua kelompok agama dan etnis dalam pembangunan negara dapat meningkatkan rasa memiliki dan solidaritas nasional. Dengan demikian, pelajaran dari Dinasti Mughal menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mengelola keragaman agama dan budaya memerlukan komitmen pada toleransi, inklusivitas, dan dialog. Negara-negara pluralistik saat ini dapat mengambil inspirasi dari model ini untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan.

Mengenal Tokoh-tokoh Pemimpin Dinasti Mughal

Berikut tokoh-tokoh pemimpin Dinasti Mughal yang berperan dalam memimpin perkembangan dan kemajuan Dinasti Mughal:

a. Zahiruddin Muhammad Babur

Babur bernama lengkap Zahiruddin Muhammad Babur. Secara geneologis Babur merupakan cucu Timur Lenk dari pihak ayah dan keturunan Jenghiz Khan dari pihak ibu. Ayahnya Umar Mirza, merupakan seorang penguasa Ferghana. Masa pemerintahan Babur ditandai oleh dua persoalan besar yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam, mereka memberontak antara tahun 1526 dan 1527 M dan munculnya penguasa muslim yang mengakui pemerintahannya di Afghanistan yang masih setia kepada keluarga Lodi. Namun Babur dapat menyelesaikan semua persoalan tersebut.

b. Naseeruddin Humayun

Babur digantikan oleh putra sulungnya, Humayun yang bernama lengkap Naseeruddin Humayun. Namanya berarti "yang disukai oleh keberuntungan". Humayun adalah orang yang cinta damai, ia adalah orang yang berkualitas, tapi ia tidak bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya. Selain itu adalah seorang raja yang dermawan, ramah dan suka memaafkan.

c. Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan

Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Akbar adalah seorang pemberani, berwatak keras, senang berperang, berburuh, dan memanah. Pada masa kecilnya, ia lebih mengutamakan berburu daripada belajar, sehingga selama hidupnya ia kurang bisa membaca dan menulis. Walaupun demikian, ia meniru sifat kakek dan ayahnya yang sangat suka mendengarkan orang-orang yang menuntut ilmu. Akbar suka membantu perkembangan sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika menerima tahta kesultanan ini, Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, kawan dekat ayahnya, seorang penganut Syiah. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kesultanan besar. Dua gerbang India yakni kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan, dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh pemerintahan Mughal. Di samping itu Akbar menerapkan politik "*Sulh-e-Kul*" atau toleransi

universal, yang memandang semua rakyat sama derajatnya, mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Dalam bidang agama, secara formal ia mengumumkan agama barunya yang bernama *Din-i-Ilahi*. *Din-i-Ilahi* yaitu menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu. Tujuannya adalah kepentingan stabilitas politik. Dengan adanya penyatuan agama ini diharapkan tidak terjadi permusuhan antar pemeluk agama.

- d. Jehangir
Pemerintahan Jehangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakan juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Kurram, putranya sendiri. Dengan bantuan panglima Muhabbat Khar, Kurram menangkap dan menyekap Jehangir. Berkat usaha permaisuri, permusuhan ayah dan anak ini dapat dipadamkan. Pada masa kepemimpinannya, Jehangir berhasil menundukkan Bengala, Mewar, dan Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi oleh ayahnya, Akbar.
- e. Syah Jehan.
Syah Jihan tampil menggantikan Jihangir. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi dua kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Raja Jujhar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian Selatan.
- f. Aurangzeb
Aurangzeb adalah Sultan Mughal besar terakhir yang memerintah mulai tahun 1658-1707 M. Dia bergelar Alamgir Padshah Ghazi. Dia adalah penguasa yang berani dan bijak. Kebesarannya sejajar dengan raja Akbar, pendahulunya. Di akhir pemerintahannya, dia berhasil menguasai Deccan, Bangla dan Aud. Sistem yang dijalankan Aurangzeb banyak berbeda dengan pendahulunya. Kebijakan-kebijakan yang telah dirintis oleh raja-raja sebelumnya banyak diubah, khususnya yang menyangkut hubungan dengan orang Hindu. Aurangzeb adalah penguasa Mughal yang membalik kebijakan konsiliasi dengan Hindu. Di antara kebijakannya adalah melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkoba (1659 M). Tahun 1664, dia juga mengeluarkan dekrit yang isinya tidak boleh memaksa perempuan untuk satidaho, yaitu pembakaran diri seorang janda yang ditinggal mati suaminya, tanpa kemauan yang bersangkutan. Akhirnya praktik ini dihapus secara resmi pada masa penjajahan Inggris. Aurangzeb juga melarang pertunjukan musik di istana, membebani non muslim dengan poll-tax, yaitu pajak untuk mendapatkan hak memilih (1668 M), menyuruh perusakan kuil-kuil Hindu dan mensponsori pengkodifikasian hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa Alamgiri.
- g. Pemerintahan Pasca-Aurangzeb
Setelah Aurangzeb meninggal (1707 M), maka dinasti Munghal ini dipimpin oleh sultan-sultan yang lemah yang tidak dapat mempertahankan eksistensi kesultanan Mughal seperti Bahadur Shah Alam, Jahandar Shah, Farrukhsiyar, Rafi ud-Darajat,, Shah Jahan, Muhammad Shah, Ahmad Shah Bahadur, Alamgir, Jahan III, Shah Alam II, Jahan Shah, Akbar Shah II, hingga berakhir pada raja terakhir Bahadur Syah II (1837-1858 M).

Mengetahui Faktor-faktor Kemunduran Dinasti Mughal Pada Masanya.

Beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mengalami kemunduran dan membawa kepada kehancuran pada tahun 1858 M, yaitu:

1. Terjadinya stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritime Mughal.
2. Kemerostan moral dan hidup mewah di kalangan elit-elit politik, yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang Negara.
3. Pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar di atasi oleh sultan-sultan sesudahnya.

4. Semua pewaris tahta kerajaan pada fase terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinan, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri
5. Banyak terjadinya pemberontakan sebagai akibat dari lemahnya para pemimpin kerajaan Mughal setelah kepemimpinan Aurangzeb, sehingga banyak wilayah-wilayah kerajaan Mughal yang terlepas dari kekuasaan Mughal.

SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Dinasti Mughal dalam membangun puncak peradaban Islam di India di tengah dominasi agama Hindu merupakan hasil dari kebijakan pluralisme agama yang inklusif dan toleran. Strategi seperti "Sulh-i Kull" yang mempromosikan perdamaian universal, pengangkatan pejabat Hindu ke posisi penting dalam pemerintahan, serta penghapusan pajak jizyah menunjukkan bagaimana Mughal mampu menciptakan keharmonisan antaragama. Kebijakan ini tidak hanya berhasil menjaga stabilitas politik dan sosial, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan seni, budaya, dan administrasi pemerintahan Mughal. Perpaduan elemen-elemen Hindu dan Islam dalam seni dan arsitektur, pengembangan musik dan sastra yang mencerminkan pluralitas, serta struktur birokrasi yang inklusif membuktikan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan dan inovasi.

Pelajaran yang dapat diambil dari keberhasilan Dinasti Mughal relevan bagi konteks kontemporer, terutama di negara-negara pluralistik. Toleransi, inklusivitas, dan dialog antaragama merupakan fondasi penting dalam menciptakan koeksistensi yang damai dan stabilitas politik. Negara-negara modern dapat mengadopsi kebijakan yang menghormati keragaman dan mendorong partisipasi aktif semua kelompok agama dan etnis dalam pemerintahan, serta menciptakan ruang untuk dialog yang membangun. Keberagaman tidak hanya perlu dikelola, tetapi juga dirayakan sebagai sumber kekuatan dan potensi untuk mendorong kemajuan sosial, budaya, dan ekonomi. Dengan demikian, pelajaran dari Dinasti Mughal memberikan wawasan berharga tentang bagaimana keberagaman dapat dikelola dengan bijaksana untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafi'i Mufadzilah Riyadi. *Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pada Masa Dinasti Mughal*. Jurnal Al Mujaddid Humuniora. Vol. 5 No: 1 April 2019.
- Ali, Muhammad Nasihudin. "Kepemimpinan Shah Jahan Di Kesultanan Mughal (1628-1658)." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 1, no. 1 (2017): 154–92.
- Dede Efrianti Lubis, Ahmad Muhajir, Zaini Dahlan. *Peradaban dan Pemikiran Islam Pada Masa Dinasti Mughal di India*. Jurnal Islamic Education. No.1. 2021.
- Derita Murni Zalukhu. *Dinasti Mughal Dan Kemunduran Islam Di India*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan (3)2, 2024
- Desky, Harjoni. "Kerajaan Safawi Di Persia Dan Mhugal India: Asal Usul, Kemajuan Dan Kehancuran." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2016): 121–41.
- Mahfudah, Rifkatul, Muh Rizal, and Umar Sulaiman. "Sejarah Peradaban Islam: Telaah Pada Fase Dinasti Turki Usmani, Safawiyah, Dan Mugal." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 12 (2024).
- Mahmudunnasir, S. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (A. Affandi, trans.). Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurdiana, Siti, and M Amril. "Sulakhul Politics as a Result of Sultan Akbar's Reformist and Revolutionary Thought Amidst Hindu Domination in India." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 12, no. 01 (2024): 43–60.
- Siti Maryam, dkk, *Sejarah Kebudayaan Islam: Dari Klasik hingga Modern* (Yogyakarta: LESFI, Cet.3, 2009), 184.
- Sumarno, Wisnu Fachrudin, and Dony Rano Virdaus. "Sejarah Penyebaran Agama Islam Di India Dan Hubungan Islam Di Nusantara." *JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia* 1, no. 1 (2023).